

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 19 Agustus 1945 oleh PPKI dibentuk suatu Provinsi dan penentuan para gubernurnya. Untuk pertama kalinya, R.M.T Soeryo yang pada saat itu menjabat sebagai Residen Bojonegoro ditunjuk sebagai Gubernur Jawa Timur dan dilantik pada tanggal 5 september 1945 sampai dengan tanggal 11 Oktober 1945 harus menyelesaikan tugas-tugasnya di Bojonegoro kemudian pada tanggal 12 Oktober 1945 beliau menempati Surabaya, Ibukota Provinsi Jawa Timur yang menandai mulai berputarnya mekanisme pemerintahan Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan pertimbangan perjalanan sejarah, maka diterbitkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 tahun 2007 tentang hari jadi Provinsi Jawa Timur yang menetapkan tanggal 12 Oktober sebagai Hari jadi Provinsi Jawa Timur dan akan diperingati secara resmi setiap tahun baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Timur. (*www.jatimprov.go.id*)

Provinsi Jawa Timur secara geografis terletak di 111^o bujur timur – 114^o bujur timur dan 7^o12 lintang selatan dengan luas wilayah sebesar 47.922 Km² yang meliputi dua bagian utama yaitu daratan Jawa Timur dan Kepulauan Madura. Wilayah daratan Jawa Timur sebesar 42.541 km² sedangkan luas kepulauan Madura adalah 5.381 km². Secara administratif Jawa Timur terbagi menjadi 29 kabupaten, 9 kota dan Kota Surabaya adalah Ibukota Provinsi. Selain itu Jawa Timur juga memiliki 666 kecamatan serta 8.501 desa/kelurahan Hal ini menjadikan Jawa Timur sebagai provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota terbanyak di Indonesia. Jawa Timur memiliki wilayah terluas di antara 6 provinsi yang ada di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 41.814.500 jiwa itu merupakan terbanyak kedua di Indonesia setelah Jawa Barat.

Alasan dipilihnya Jawa Timur sebagai objek penelitian adalah pada Provinsi Jawa Timur masih terdapat permasalahan atau fenomena yang akan menjadi dasar penulis melakukan penelitian ini seperti terdapat penurunan dan peningkatan yang signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dan akan dijabarkan lebih jelas pada bagian latar belakang, selain itu sesuai data dari hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang menyatakan bahwa Jawa timur mendapatkan hasil Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan oleh Badan Pengawas Keuangan secara berturut-turut sebanyak sembilan kali sejak tahun 2015. Wajar Tanpa Pengecualian diberikan untuk menunjukkan suatu kewajaran informasi laporan keuangan bukan secara spesifik untuk menyatakan bahwa entitas yang mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian telah bebas dari permasalahan yang ada. Jika suatu entitas mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian, berarti tata kelola keuangan entitas tersebut secara umum telah baik, namun masih terdapat daerah yang mendapatkan opini selain wajar tanpa pengecualian dan terdapat kesalahan pada penyajian kas.

Wajar Tanpa Pengecualian yang didapatkan oleh Jawa Timur masih lebih baik daripada Wajar Tanpa Pengecualian di Provinsi Banten dan DKI Jakarta. Di Provinsi Banten tercatat mendapatkan tujuh kali Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2016, sedangkan di DKI Jakarta tercatat mendapatkan Enam kali Wajar Tanpa Pengecualian sejak tahun 2017. Hal ini tentunya, semakin membuktikan bahwa kinerja Pemprov Jawa Timur telah berjalan transparan dan akuntabel. Namun berdasarkan hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2022, Badan Pemeriksa Keuangan masih menemukan kelemahan pengendalian intern dan permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan hanya saja hal itu tidak mempengaruhi secara material kewajaran penyajian Laporan Keuangan Tahun 2022 permasalahan tersebut seperti, pengendalian belanja hibah uang pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya tidak sesuai ketentuan, pelaksanaan pekerjaan atas belanja modal gedung dan bangunan

pada delapan SKPD tidak sesuai ketentuan dan pelaksanaan pekerjaan atas belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga tidak sesuai ketentuan. (*jatim.bpk.go.id*)

1.2 Latar Belakang Penelitian

Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya, bisa diukur dari kinerja keuangannya. Seiring dengan adanya paska reformasi, maka pemerintah pusat memberikan kebijakan otonomi pada masing-masing daerah untuk mengelola keuangan setiap daerahnya sendiri. Perlunya pengelolaan keuangan secara mandiri oleh pemerintah daerah agar proses pembangunan yang dilakukan dapat diselesaikan tanpa harus bergantung dengan bantuan pendanaan yang diberikan oleh pusat, maka dari penjelasan diatas pentingnya dilakukan pengukuran kinerja keuangan (Sihombing & Arsani, 2020).

Terdapat beberapa fenomena di dalam penelitian ini yaitu Kinerja keuangan pada tahun 2018 tertinggi dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Malang sebesar 100% hal ini membuktikan bahwa pada tahun tersebut daerah itu memiliki tingkat kemandirian yang meningkat hal tersebut dapat dilihat pada pendapatan asli daerah yang memiliki jumlah cukup tinggi. Pada tahun 2019 kinerja keuangan tertinggi tetap dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo sebesar 86% ada penurunan sebesar 14% dikarenakan total pendapatan daerah lebih besar jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah. Sedangkan pada tahun 2020 Kota Surabaya yang justru memiliki tingkat persentase kinerja keuangan tertinggi dimana nilainya sebesar 47%. Hal ini dikarenakan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2020 mengalami penurunan yang signifikan diakibatkan karena adanya pandemi covid sehingga menyebabkan sektor pariwisata juga mengalami penurunan yang berakibat pendapatan daerah juga menurun.

Pada tahun 2021 Kota Surabaya tidak lagi memiliki tingkat persentase kinerja tertinggi disebabkan karena beberapa sumber pendapatan mengalami penurunan seperti pajak dan retribusi selain itu juga adanya pembatasan sosial yang menyebabkan pendapatan dari sektor hiburan atau pariwisata juga menurun. Kemudian pada tahun 2021 Kabupaten Jombang memiliki presentase kinerja keuangan tertinggi sebesar 62% dikarenakan lebih cepat melakukan

pemulihan ekonomi pasca covid yaitu dengan melakukan peningkatan sektor usaha kecil mikro menengah (UMKM) yang didukung oleh program pemerintah seperti pemberian bantuan modal dan pelatihan, selain itu sektor pariwisata juga mulai bangkit seperti wisata religi dan alam. Namun pada tahun 2022 Kabupaten Jombang mengalami penurunan sangat drastis diakibatkan karena keterbatasan alokasi anggaran untuk program pembangunan dan pemulihan ekonomi yang dialihkan untuk sektor kesehatan dan bantuan sosial serta ada beberapa proyek yang terlambat. Kinerja keuangan tertinggi tahun 2022 dimiliki Kabupaten Mojokerto sebesar 100% karena penerimaan retribusi dan pajak daerah meningkat. Pada tahun 2023 kinerja keuangan tertinggi dimiliki oleh kabupaten sumenep sebesar 100% hal ini dikarenakan Kabupaten Sumenep melakukan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan seperti di sektor pariwisata dan perdagangan. Dari penjelasan diatas kinerja keuangan dari tahun 2018-2023 memiliki persentase tertinggi dan terendah yang berbeda beda angkanya sehingga kabupaten/kota yang memiliki persentase tertinggi atau terendah berbeda-beda pula setiap tahun. Berikut merupakan tabel penjabaran dari data di atas:

Tabel 1.1 Persentase Kinerja Keuangan Tahun 2018-2023 di beberapa Daerah Jawa Timur

Tahun	Daerah	Kinerja Keuangan (%)	Keterangan
2018	Kabupaten Ponorogo	100	Kinerja keuangan tertinggi karena pendapatan asli daerah yang cukup tinggi
2018	Kabupaten Malang	100	Kinerja keuangan tertinggi karena pendapatan asli daerah yang cukup tinggi
2019	Kabupaten Ponorogo	86	Penurunan sebesar 14% karena total pendapatan daerah lebih besar dibandingkan pendapatan asli daerah

Tahun	Daerah	Kinerja Keuangan (%)	Keterangan
2020	Kota Surabaya	47	Kinerja keuangan tertinggi di tahun 2020
2021	Kabupaten Jombang	62	Pemulihan ekonomi cepat pasca-COVID melalui UMKM dan dukungan pemerintah
2022	Kabupaten Mojokerto	100	Penerimaan retribusi dan pajak daerah meningkat
2023	Kabupaten Sumenep	100	Kinerja tertinggi karena pemulihan ekonomi berkelanjutan di sektor pariwisata dan perdagangan

Penjelasan diatas merupakan fenomena tentang kinerja keuangan namun masih terdapat fenomena lainnya seperti terdapat daerah yang masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) seperti Kabupaten Jember pada saat tahun 2022, hal itu disebabkan karena Badan Pemeriksa Keuangan menemukan adanya penyajian kas untuk pengeluaran sebesar 107.097.212.169,00 miliar. Pengeluaran sebesar itu meliputi jenis belanja yaitu belanja honorarium, belanja uang saku, belanja makan minum bantuan sosial, belanja barang pakai habis (alat tulis kantor, obat-obatan, alat kebersihan, alat kesehatan, makan minum petugas, alat pelindung diri), belanja modal (alat-alat kesehatan, wastafel), belanja bansos (sembako, uang tunai). Selain itu Badan Pengawas Keuangan memeriksa LKPD Jember juga menemukan beberapa permasalahan seperti kelebihan honor tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan sebesar Rp 153,629 juta dan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp 1,237 miliar, ada juga kelebihan pembayaran sebesar Rp 2,067 miliar akibat kekurangan volume atas 24 pekerjaan belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber daya

Air Jember Rp 2,01 miliar, selain itu penatausahaan barang milik daerah berupa asset tetap belum memadai akibatnya nilai asset tetap dan akumulasi penyusutan yang dilaporkan pada neraca dan itu berpotensi tidak mencerminkan nilai wajar. Hal tersebut menjadi fenomena yang mendasari peneliti melakukan penelitian ini. (www.jatim.bpk.go.id)

Kinerja keuangan menurut Halim dan Hanafi (2016) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Kinerja keuangan suatu instansi pemerintah juga dapat diartikan sebagai hasil dari sistem pengelolaan keuangan yang mengukur tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi tersebut. Hal ini merupakan penjabaran dari visi, misi, dan strategi instansi pemerintah, yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, kinerja keuangan instansi pemerintah mencerminkan seberapa baik instansi tersebut mengelola keuangannya untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam rencana strategisnya. Hal ini menjadi evaluasi atas kemampuan instansi dalam menjalankan program dan kebijakannya secara efektif (Nasution, 2019).

Penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan menggunakan analisis rasio kemandirian keuangan daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaan belanja modal dapat dilihat dari analisis rasio kemandirian keuangan daerah pada APBD dan memiliki tujuan untuk membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode yang dibandingkan dengan periode sebelumnya. Kinerja keuangan biasanya dinyatakan dengan rasio kemandirian keuangan daerah yang diidentifikasi dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Mahmudi, 2019).

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah pendapatan asli daerah. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004, pendapatan asli daerah merupakan pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan peraturan daerah

yang belaku. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Selain itu menurut (Sumawan & Sukartha, 2016) berpendapat bahwa peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah yang tinggi setiap tahunnya menunjukkan pula tingginya sumber keuangan yang dimiliki daerah. Jika sumber keuangan yang dimiliki mampu dimanfaatkan dan dikelola dengan optimal maka memberikan cerminan kinerja dari pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Mustanda, 2019) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berarti dapat diartikan jika setiap peningkatan pendapatan asli daerah maka akan diikuti oleh pertumbuhan kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan pada penelitian (Pratama & Mawardi, 2022) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor kedua yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah belanja modal adalah pengeluaran pemerintah daerah yang dijadikan sebagai investasi jangka panjang dan sarana pembangunan daerah sehingga memberikan manfaat dan dana tambahan bagi keuangan daerah setiap tahunnya. Peningkatan program dapat menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas, salah satunya untuk mengetahui apakah kinerja pemerintah menunjukkan hasil yang efektif atau tidak. Kinerja keuangan dapat dipengaruhi oleh beberapa komponen yang terdapat dalam laporan realisasi APBD yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah. Hal ini dikarenakan semakin banyak belanja modal maka semakin tinggi produktivitas perekonomian dalam hal kinerja pemerintah daerah (Darwanis & Saputra, 2014). Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan. Selain itu menurut Permendagri No. 13 Tahun 2016 belanja modal didefinisikan sebagai pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian atau pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12

bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, dan asset tetap lainnya. Realisasi belanja modal konsolidasian Provinsi Jawa Timur tahun 2022 mencapai Rp 17,38 triliun atau mencapai 97,30% dari alokasi pagu yang telah ditetapkan sebesar Rp 17,86 triliun. Capaian realisasi belanja modal merupakan realisasi tertinggi selama periode 2018-2022. Dibandingkan tahun 2021 alokasi belanja modal turun sebesar 4,89% dan nominal realisasi turun sebesar 4,08%. Presentase realisasi belanja modal yang menurun perlu untuk mendapatkan perhatian terutama dari sisi perencanaan dan pelaksanaan dengan mempertimbangkan pandemi covid-19 (www.bpkad.jatimprov.go.id). Penjelasan tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Niswani *et al.*, 2022) menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh (Antari & Sedana, 2018) menyatakan jika belanja modal berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah adalah opini audit. Keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan berbagai prinsip atau kebijakan dalam pengelolaan daerah otonomnya tertuang dalam hasil laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD), yaitu hasil penilaian laporan keuangan dalam bentuk opini audit (Insani, Amin 2023). Opini audit merupakan pernyataan profesional yang kesimpulannya diambil oleh auditor mengenai kebenaran informasi lengkap yang disajikan dalam laporan keuangan entitas yang diaudit (Yusuf *et al.*, 2023).

Opini audit adalah penilaian auditor independen atas keandalan laporan keuangan yang disampaikan oleh pemerintah daerah. Tujuan dari sebuah audit atas laporan keuangan pemerintah daerah adalah untuk meningkatkan kepercayaan pengguna laporan keuangan, yang tercapai melalui pernyataan audit atau opini yang menyajikan bahwa laporan keuangan tersebut telah menyajikan seluruh fakta material menurut standar akuntansi yang ditetapkan. Dengan kata lain, opini audit merupakan penilaian profesional dan independen terhadap kualitas dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah, yang

bertujuan untuk memastikan bahwa informasi keuangan yang disajikan oleh pemerintah daerah telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah di hadapan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. (Nurbaiti & Yanti, 2022).

Menurut Undang-Undang No 15 Tahun 2004 menyatakan bahwa opini BPK dapat menjadi tolak ukur untuk menilai akuntabilitas sebuah entitas pemerintah. Opini ini bisa menaikkan atau menurunkan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan atas pelaporan yang disajikan oleh pihak yang diaudit, dengan kata lain semakin baik opini audit BPK maka seharusnya dapat menunjukkan semakin membaiknya kinerja suatu pemerintah daerah.

Studi yang mengeksplorasi hubungan antara pendapatan asli daerah (PAD), belanja modal, dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Provinsi Jawa Timur selama periode 2018-2023 mengungkap potensi permasalahan yang kompleks. Pertama-tama, kendala mungkin muncul dalam mengelola PAD sebagai sumber pendapatan utama. Jika PAD tidak mencapai target atau mengalami fluktuasi yang signifikan, hal ini dapat menghambat kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai program-program pembangunan dan kegiatan operasional. Selain itu, jika belanja modal tidak diarahkan dengan efisien dan efektif, hal ini dapat menyebabkan penundaan atau bahkan kegagalan dalam implementasi proyek-proyek strategis, yang pada akhirnya akan berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, pentingnya opini audit yang baik menjadi faktor krusial dalam membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Jika opini audit menunjukkan adanya kelemahan atau ketidakpatuhan terhadap standar akuntansi dan peraturan keuangan, hal ini dapat menimbulkan keraguan terhadap transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan dana publik. Akibatnya, potensi konsekuensi yang dapat muncul antara lain menurunnya kredibilitas pemerintah daerah dalam mengakses pembiayaan, serta meningkatnya risiko terhadap tindakan hukum atau sanksi

administratif. Oleh karena itu, studi ini memberikan landasan penting untuk memahami dinamika kompleks antara faktor-faktor tersebut dalam menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dan mengidentifikasi upaya-upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan stabilitas dan kredibilitas sistem keuangan daerah. Opini audit menjadi indikator penting bagi penilaian kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik yang berkelanjutan, sehingga dapat menjadi dasar bagi upaya peningkatan kinerja pemerintah daerah (Nurbaiti & Permatasari, 2019).

Kewajaran suatu opini audit yang diberikan menunjukkan pengelolaan keuangan dari suatu pemerintah daerah yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kinerja dari pemerintah daerah tersebut. Didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Suandani & Astawa, 2021) bahwa opini audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Hapsari, 2020 bahwa opini audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah.

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa masih terdapat inkonsistensi hasil penelitian terdahulu pada pendapatan asli daerah, belanja modal dan opini audit sehingga dengan adanya inkonsistensi penelitian terdahulu tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Opini Audit Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. (Studi Kasus Pada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2023)”**.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang sudah dijelaskan, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola pemerintahan secara mandiri dengan mengoptimalkan sumber-sumber yang dimiliki dan penggunaannya harus berpihak untuk kepentingan masyarakat dan memberikan layanan yang baik untuk masyarakat. Undang-Undang No 32 Tahun 2014 menjadi landasan pemerintah daerah untuk melaksanakan otonomi daerah untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah mengatur pengelolaan keuangan daerah

demi terciptanya pembangunan yang merata, sehingga dapat meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di daerah tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan adalah pendapatan asli daerah, belanja modal, dan opini audit. Faktor-faktor tersebut telah diteliti oleh peneliti terdahulu namun, memiliki hubungan yang tidak konsisten sehingga mendorong peneliti untuk melakukan penelitian kembali agar mendapatkan hasil yang diharapkan.

Berdasarkan latar belakang penelitian yang diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Opini Audit berpengaruh secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023?
2. Apakah terdapat pengaruh secara parsial:
 - a. Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023?
 - b. Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023?
 - c. Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2023?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Opini Audit secara simultan terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022
2. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial dari variabel:
 - a. Pendapatan Asli Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022
 - b. Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022

- c. Opini Audit terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Provinsi Jawa Timur tahun 2018-2022

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan kegunaan dalam beberapa aspek yaitu:

1.5.1 Aspek Teoritis

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari pengembangan pengetahuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai hasil dari pendapat asli daerah, belanja modal dan opini audit terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di provinsi Jawa Timur

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi serta memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan dapat menambah pengalaman dalam menerapkan pengetahuan yang dihadapi yang berkaitan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah.

1.5.2 Aspek Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak lain sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada dan bisa dijadikan motivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja keuangan yang bisa dijadikan tolak ukur untuk mengelola keberhasilan suatu daerahnya.

2. Bagi Masyarakat/Pembaca

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang Kinerja keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur dan bisa bermanfaat bagi masyarakat atau pembaca.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Dalam setiap bab terdapat sub sub yang disesuaikan dengan pedoman penulisan. Berikut ini penjelasan dari masing-masing bab:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan tentang objek penelitian dan latar belakang masalah yang menceritakan terkait kinerja keuangan pemerintah daerah dan fenomena yang terjadi. Berdasarkan hal tersebut terdapat rumusan masalah serta tujuan atas penelitian ini sekaligus manfaat penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan kajian pustaka secara singkat, jelas dan padat mengenai landasan teori dari umum sampai ke khusus, penelitian terdahulu sebagai referensi penelitian, pengembangan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang karakteristik penelitian, metode pengumpulan data, jenis dan sumber data yang digunakan, populasi dan sampel serta metode analisis penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan terkait hasil penelitian dan pembahasannya secara jelas dan sistematis sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan terkait kesimpulan yang didasarkan pada hasil penelitian, keterbatasan penelitian, saran dan implikasi penelitian.